

THE CAUSE OF THE OCCURRENCE OF HUMAN TRAFFICKING IN WEST JAVA

PENYEBAB TERJADINYA HUMAN TRAFFICKING DI JAWA BARAT

Siti Nurbayani K

Dosen Jurusan MKU FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia

Jl. Dr. Setiabudhi No 229 Bandung

E-mail: sitinurbayani02@gmail.com

ABSTRACT

The cause of the occurrence of human trafficking in West Java region, which is very fundamental that is due to poverty and education. The second factor that is predominantly being the main reason why many of the victims of human trafficking originating from West Java, involving various elements. In addition, cultural factors and lifestyle has become a powerful driving force as the driving factor for teenagers and people who are in the country to move due to lack of land occupation, and factor in their place due to towing will work, there is a glimmer of hope in a better life than working in the place of origin.

Keywords: Human Trafficking, Trafficking in Women, and Trafficking in Children

ABSTRAK

Penyebab terjadinya perdagangan manusia yang ada di wilayah Jawa Barat, yang sangat mendasar yaitu karena faktor kemiskinan dan pendidikan. Kedua factor tersebutlah yang secara dominan menjadi alasan utama mengapa banyak korban perdagangan manusia yang berasal dari Jawa Barat yang melibatkan berbagai unsur. Selain itu, faktor kebudayaan dan gaya hidup pun menjadi pendorong yang ampuh sebagai faktor pendorong agar remaja dan orang-orang yang berada di pedesaan untuk berpindah karena kurangnya lahan pekerjaan, dan factor penarik karena di tempat mereka akan bekerja terdapat secercah harapan akan kehidupan yang lebih baik dibandingkan bekerja di tempat asal.

Kata Kunci: Perdagangan Manusia, Perdagangan Perempuan, dan Perdagangan Anak

Fenomena “*human trafficking*” dewasa ini semakin marak (Suhardin, 2008: 473) dilakukan dalam berbagai keadaan, terhadap berbagai level masyarakat dan modus yang semakin bervariasi. *Human trafficking* terjadi sebagai akibat dari proses interaksi antar manusia yang menyimpang. Biasanya didasari atas suatu paksaan, tipuan, ancaman bahkan kekerasan. Hal tersebut tentu saja telah masuk pada ranah pelanggaran HAM. Idealnya hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi oleh semua pihak, sehingga implementasi hak asasi manusia dapat ditegakkan dalam kehidupan nyata di masyarakat. Namun pada kenyataannya, harapan ideal tersebut tidak selalu dapat terlaksana dengan baik karena

sampai saat ini, pelanggaran hak asasi manusia masih terjadi.

Kesigapan negara Indonesia untuk membuat aturan-aturan dalam rangka melindungi warga negara pada kasus *human trafficking* semakin serius mendapat perhatian dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa perdagangan orang yaitu:

Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi

Indonesia sebagai salah satu negara sumber, penerima dan bahkan transit untuk *trafficking* internasional telah mempunyai komitmen yang tegas dalam penanggulangan masalah jaringan *trafficking* internal khususnya (Meutia, 2010: 144).

Di Provinsi Jawa Barat penguatan terhadap undang-undang tersebut dilakukan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dengan mengeluarkan Peraturan Daerah tentang *Trafficking* Provinsi Jawa Barat, yaitu Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008. Sebenarnya secara kuantitatif, peristiwa *human trafficking* lebih kecil dibandingkan dengan pelanggaran atas penghormatan dan perlindungan hak-hak asasi manusia lainnya. Namun, kegiatan *trafficking* selalu menimbulkan rasa khawatir bahkan rasa cemas di kalangan masyarakat, dikarenakan perkembangan kejahatan ini modusnya semakin bervariasi.

Jawa Barat sebagai provinsi terbesar jumlah penduduknya di Indonesia, ternyata menjadi sasaran target para *trafficker*. Data terbaru korban *trafficking* dari P2TP2A JABAR jumlah penduduk Jawa Barat yang menjadi korban *trafficking* pada tahun 2010 berjumlah 83 orang dan 2011 sebanyak 68 orang, sehingga keseluruhan jumlah korban selama 2010-2011 terdata sebanyak 151 orang. Wilayah yang paling sedikit terdapat di 5 (lima) wilayah, yaitu Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Bekasi, dan Kota Cimahi (Kegiatan Semiloka, 6 September 2012, Hotel Anggrek, Bandung).

Maraknya korban *human trafficking* di Jawa Barat bukan hanya terjadi dalam kasus penculikan dan paksaan saja. Hal tersebut juga terjadi karena adanya tekanan ingin mendapatkan pekerjaan, misalnya seperti menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI). Persoalan TKI seringkali dikaitkan dengan isu *trafficking*, padahal isu *trafficking* tidak hanya terjadi pada tenaga kerja yang berada di luar

perbatasan Indonesia tetapi *trafficking* dapat terjadi juga di dalam wilayah Negara Indonesia (Muftichah dan Bintoro, 2009: 125)

Banyaknya orang yang mau menjadi TKI sebagai pembantu rumah tangga karena adanya faktor pendorong (*push-factor*) dari pedesaan dan adanya faktor penarik (*pull factor*) dari relokasi industri di negara-negara tempat TKI bekerja (Syafaat dalam Rahayu, 2011: 116). Namun, tidak semua orang memahami pekerjaan TKI dalam arti Pembantu Rumah Tangga. José Maria Ramirez-Machado dalam Ramdlany dan Munir (2011: 190) bahwa PRT merupakan bentuk pekerjaan dengan elemen-elemen sebagai berikut: tempat kerjanya adalah sebuah rumah pribadi, pekerjaan yang dilakukan bersifat melayani rumah tangga; pekerjaan dilakukan atas nama majikan langsungnya, kepala rumah tangga; PRT langsung di bawah otoritasnya, pekerjaan dilakukan secara reguler dan dilakukan dengan cara yang terus-menerus; pekerjaannya tidak berkaitan dengan uang dari kegiatan yang dilakukannya; pekerjaan yang dilakukannya akan diberi remunerasi baik dengan uang tunai atau dengan bentuk lainnya dan pekerjaan yang dilakukannya sangat beraneka ragam. Pada akhirnya, orang-orang yang tidak menyadari jenis pekerjaan tersebut malah menjadi korban *human trafficking* oleh majikannya sendiri dan agen penyalurnya.

METODE

Pendekatan, Metode, Lokasi, dan Instrumen Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui penelitian lapangan dengan cara menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang lebih menekankan pada pemaknaan dan konteks pendeskripsian. Analisis terhadap gejala/permasalahan sosial sering tidak dipahami berdasarkan apa yang diucapkan dan dilakukan karena setiap ucapan dan tindakan seseorang sering mempunyai makna tertentu. Metode penelitian yang digunakan ialah metode studi kasus. Yin (2002, hlm. 18) menyatakan bahwa studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata bilamana, batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas, dan dimana multisumber bukti dimanfaatkan”.

Lokasi penelitian ini disesuaikan dengan sampel/informan yang dipilih untuk diwawancara. Lokasi utama yaitu di Jawa Barat yang merupakan tempat terbesar pertama di negeri Indonesia kasus korban *trafficking*-nya. Di Jawa Barat ini difokuskan di wilayah Kabupaten Bandung, hal ini dilakukan karena berdasarkan data P2TP2A (Program Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) merupakan korban terbanyak di wilayah Jawa Barat.

Sumber data dalam penelitian kualitatif yaitu kata-kata/ Pernyataan dari subjek yang diteliti yang akan digali melalui hal-hal sebagai berikut.

1. Informan Utama (subjek penelitian) dalam hal ini adalah para korban *trafficking*.
2. Informan (orang tua korban/tetangga/masyarakat)

Institusi yang berhubungan dengan penanganan korban (P2TP2A (Program Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), BPPKB (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana), Gugus tugas Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang), dan shelter serta LBH PEKA)

Instrumen utama dalam penelitian adalah penulis sendiri yang terjun langsung ke lapangan untuk mencari informasi melalui observasi dan wawancara. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan antar manusia, artinya selama proses penelitian penulis akan lebih banyak mengadakan kontak dengan orang-orang yang menjadi korban *human trafficking*. Dengan demikian penulis lebih leluasa mencari informasi dan data yang terperinci tentang berbagai hal yang diperlukan untuk kepentingan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, instrumen inti dalam mengungkap sumber data ialah peneliti itu sendiri. Peneliti membuat Instrumen pembantu berupa pedoman wawancara, pedoman observasi, dan pedoman studi dokumentasi.

Kegiatan analisis data pada penelitian ini akan dilakukan melalui tahap-tahap: (1) pengumpulan data atau reduksi data, (2) penyajian data dan (3) penarikan kesimpulan

atau verifikasi data. Miles & Huberman, (2007: 73) mengemukakan bahwa analisis data selama pengumpulan data membawa peneliti mondar-mandir antara berpikir tentang data yang ada dan mengembangkan strategi untuk mengumpulkan data baru. Melakukan koreksi terhadap informasi yang kurang jelas dan mengarahkan analisis yang sedang berjalan berkaitan dengan dampak pembangkit kerja lapangan. Langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data yaitu (1) penyusunan lembar rangkuman kontak (*contact summary sheet*), (2) pembuatan kode-kode, (3) pengkodean pola (*pattern coding*) dan (4) pemberian memo.

Pelaksanaan penelitian kualitatif dengan studi kasus ini seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa peran peneliti sangat vital dalam penggalian data, oleh karenanya untuk objektivitas maka perlu dilakukan validasi data melalui beberapa kegiatan, *member check*, triangulasi, saturasi, dan expert opinion (Wiriatmadja, 2012 hlm 171).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Latar Belakang Terjadinya *Human Trafficking*

Berdasarkan hasil deskripsi informan di atas, latar belakang terjadinya *human trafficking* dapat terlihat pada informasi sebagai berikut:

1. SM atau Ani (nama samaran), bertempat tinggal di Kampung Cihareuheuy RT 03/06 Desa Padaulun Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Pendidikan terakhir sampai SMP.
2. SMP, bertempat tinggal di kampung Cikoneng Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. Pendidikan terakhir berijazah SMP, namun sempat mengenyam pendidikan di MA.
3. FH bertempat tinggal di Desa Padaulun Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Pendidikan terakhir SMP.
4. YN bertempat tinggal di Dusun Sindangrenah RT 01/RW 01, Desa Jatihurip, Kecamatan Sumedang Utara. Pendidikan terakhir di kelas VIII SMP. YN yang masih berusia 13 tahun menjadi korban *trafficking* berawal dari perkenalan di jejaring sosial (*Facebook*).

5. S bertempat tinggal di Desa Cinanggela Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung. pendidikan terakhir tidak tamat SD.

Dengan demikian, latar belakang terjadinya *human trafficking* dikategorisasi menjadi tiga yaitu (a) pendidikan; (b) kemiskinan orang tua; (c) pola asuh keluarga; dan lingkungan sosial budaya keluarga, (d) pergaulan dan gaya hidup

a. Pendidikan yang rendah

Pendidikan mempunyai fungsi untuk mengembangkan potensi manusia agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Kompetensi dasar yang merupakan *learning basic skill* untuk hidup yang kurang memadai dapat menyebabkan seseorang tidak dapat memecahkan masalah kehidupan yang menghimpitnya. Fenomena minimnya pendidikan yang dimiliki baik oleh korban maupun orang tuanya merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya *human trafficking*.

b. Kemiskinan Orang tua

Kemiskinan identik dengan ketidakberdayaan secara ekonomi terlihat terkait dengan kemiskinan korban *trafficking*. Kemiskinan merupakan gambaran kehidupan sebab kekurangan mengakibatkan orang mencari berbagai cara untuk keluar dari kemiskinan. Kemiskinan merupakan faktor yang menyebabkan terjadi *human trafficking* dapat dikemukakan sebagai berikut:

SM menjadi korban *Trafficking* berawal dari ajakan bekerja dengan gaji besar sekitar 1,2 juta, dan pekerjaannya enak, seperti di supermarket dan tukang pijat di salon (1.2). SM mengungkapkan “nya abdi mah bade di dameul, teu terang di damelna kumaha da nyariosna ge sanes bade di kape Lubuk Linggau Sumatera, da abdi mah bade di Bandung gajina 1,2 juta da pun bibi nu ngajakna teh”, kemudian dia mengungkapkan kembali bahwa “nya Atika nu dianggap bibi, da murangkalihna dipasihkeun, dicandak damel, abdi keur te damel ti payun teh, teu terang teu kitu”.

SMP menjadi korban *trafficking* berawal dari ajakan bekerja dalam rangka membanggakan orang tua bahwa SMP bisa mandiri, dan bisa memberi orang tua berupa materi.

FH menjadi korban *trafficking* berawal dari adanya penawaran bekerja, dengan pekerjaan yang sangat menyenangkan dan mudah karena akan dipekerjakan di salon/spa di daerah Jakarta. Hal ini ditegaskan oleh Mamah Nonong sebagai ibu dari FH bahwa “Da abdi ge teu terang, manawi teh damel-damel biasa, sanes kangge diical kitu?, da nyariosna teh kanggo di salon, babantu di Jakarta, di Spa saurna teh, nya teu nanaon atuh”

S menjadi korban *trafficking* / penipuan berawal dari himpitan ekonomi. S ditawarkan untuk bekerja di Malaysia oleh salah satu agen/sponsor di Kota Bandung yang diwakili oleh Sudinar. Pekerjaan disana yaitu sebagai petani kelapa sawit dengan dijanjikan gaji besar, yaitu sebesar 700 ringgit per bulan. S menuturkan “ti sponsor bu, da abdi oge awalna mah teu niat bade damel di Malaysia, tapi da ti lembur seueur nu ngiring lewat sponsor. Da dugi ditu teh geuningan teu sapertos nu dijanjikeun, kan didie sateuacan angkat nu bade damel teh diiming-imingi gaji bersih 700 ringgit sabulanna.

c. Pola Asuh Keluarga dan lingkungan sosial budaya

Pola asuh keluarga yang merupakan faktor penyebab terjadinya *human trafficking* dapat dikemukakan sebagai berikut: etelah ditanyakan kepada Priyana (salah seorang guru YN) beliau menyatakan bahwa setelah YN menginjak ke semester 2, dia sering bolos dan berbohong.

d. Pergaulan dan gaya hidup

Pergaulan dan gaya hidup khususnya dari media sosial, berpengaruh terhadap faktor penyebab terjadinya *human trafficking*. Dengan alasan diajak teman yang baru dikenalnya untuk berjalan-jalan YN tanpa berpikir panjang mau ikut dengan orang yang baru dikenalnya. Kemudian Gaya hidup yang terlalu tinggi ditandai dengan membawa Handphone 3 buah ke sekolah. Di sekolah tidak banyak teman, dikarenakan YN bergaul dengan siswa-siswa yang umurnya jauh diatasnya

Motivasi yang Mendasari Terjadinya Human Trafficking

Motivasi sebagai dorongan orang untuk melakukan tindakan. Disposisi kebutuhan setiap orang unik, namun pada umumnya

korban *trafficking* memberikan gambaran bahwa kebutuhan dasar manusia, seperti ekonomi, gaya hidup dan keinginan berbakti kepada orang tua merupakan campuran motivasi yang merupakan faktor latar belakang penyebab terjadinya *human trafficking*.

Faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya *human trafficking* juga ditentukan oleh motivasi sebagai berikut:

1. *Ekonomi*
SM (24) / Ani (Kabupaten Bandung, Jawa Barat); Kasus 2: SMP Megawati Purnama (22) / SMP (Kabupaten Bandung, Jawa barat); Kasus FH(18) (Kabupaten Bandung); Kasus 10 : S (52) (Kabupaten Bandung, Jawa Barat), jenis dan intesionalitas motivasinya adalah faktor ekonomi dan pendidikan yang rendah.
2. *Pola Asuh*
W (24) (Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat), jenis dan intesionalitas motivasinya adalah pola asuh orang tua/keluarga.
3. *Ekonomi dan Gaya Hidup*
YN(13) (Kabupaten Sumedang, Jawa Barat), jenis dan intesionalitas motivasinya adalah karena gaya hidup / *life style*.

Keyakinan dan Sikap Yang Mendasari Terjadinya *Human Trafficking*

Keyakinan dalam konteks budaya tertentu bersifat interpretatif. Pada lingkungan masyarakat yang menghadapi masalah kemiskinan dan pendidikan rendah, uang dan pola asuh bisa menjadi sebuah keyakinan yang tanpa disadari mengembangkan cara-cara yang tidak normatif dalam menjalani kehidupan. Gambaran keyakinan yang terkait dengan uang sebagai keyakinan dapat ditemukan pada kasus sebagai berikut:

YN(13) (Kabupaten Sumedang, Jawa Barat), dasar keyakinan dan kecenderungan perilaku yang mendasarinya adalah atas dasar keinginan sendiri karena gaya hidup/*life style* remaja yang konsumtif ditambah dengan teknologi yang semakin canggih. Sehingga ada kecenderungannya apapun dilaksanakan asalkan keinginannya (gaya hidup mewah) tercapai.

Konteks Yang Menyebabkan Terjadinya *Human Trafficking*

Konteks lingkungan sosial budaya merupakan narasi besar penyebab terjadi *human trafficking*. Lingkungan sosial budaya yang berakar dari kemiskinan dapat dengan mudah dijadikan sasaran *human trafficking*. Hal tersebut ditemukan pada beberapa kasus sebagai berikut:

Kemiskinan

SM (24) / Ani (Kabupaten Bandung, Jawa Barat); Kasus 2: SMP Megawati Purnama (22) / SMP (Kabupaten Bandung, Jawa barat); Kasus 3 : FH(18) (Kabupaten Bandung); Kasus 4 : YN(13) (Kabupaten Sumedang, Jawa Barat); dan Kasus 10 : S (52) (Kabupaten Bandung, Jawa Barat), konteks yang menyebabkan terjadinya *humantrafficking* adalah konteks kerentanan ekonomi keluarga yang kemudian mendorong korban untuk mencari pekerjaan dengan berbagai cara.

Pembahasan

Fenomena perdagangan orang di Indonesia sejak krisis yang lalu, kini semakin meningkat. Tidak saja terbatas untuk tujuan prostitusi atau eksploitasi seksual orang, melainkan juga meliputi bentuk-bentuk eksploitasi lain, seperti kerja paksa dari praktik menyerupai perbudakan di beberapa wilayah sektor Informal, termasuk kerja domestik dan mempelai pesanan (Rahayu, 2011: 117). Akan tetapi, yang dominan menjadi korban dalam *human trafficking* ini adalah kaum perempuan. Hal tersebut terjadi karena perempuan telah mengalami fase yang sangat panjang sebagai bukti adanya kesenjangan gender. Salah satu bentuk yang terjadi yaitu marginalisasi.

Menurut Alison Scott (Khotimah, 2009: 161), seorang ahli sosiologi Inggris melihat berbagai bentuk marginalisasi dalam empat bentuk yaitu: (1). Proses pengucilan, perempuan dikucilkan dari kerja upahan atau jenis kerja tertentu, (2) Proses pergeseran perempuan ke pinggiran (margins) dari pasar tenaga kerja, berupa kecenderungan bekerja pada jenis pekerjaan yang memiliki hidup yang tidak stabil, upahnya rendah, dinilai tidak atau kurang terampil, (3) Proses feminisasi atau segregasi, pemusatan perempuan pada jenis pekerjaan tertentu (feminisasi pekerjaan), atau pemisahan yang sematamata dilakukan oleh perempuan saja atau laki-laki saja. (4) Proses

ketimpangan ekonomi yang mulai meningkat yang merujuk di antaranya perbedaan upah.

Dengan terjadinya marginalisasi tersebut, keturunan yang tidak mempunyai latar belakang orang berada dan dari keluarga lengkap, terus terjerembab dalam kemiskinan. Dalam penelitian lain disebutkan, bawa kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, kondisi keluarga yang tidak mampu memberikan perlindungan kepada anak-anaknya, pergaulan bebas merupakan beberapa faktor yang mendorong anak-anak masuk dalam dunia perdagangan anak, menjadi korban anak-anak yang dilacurkan (Wismayanti, 2012: 118).

Dari tinjauan yuridis, Suhardin (2008: 477-480) menyebutkan bahwa faktor penyebab human trafficking yaitu:

1. Lemahnya law enforcement, yaitu lemahnya penegakkan hokum peaku Tindak Pidana perdagangan manusia.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat, khususnya korban trafficking untuk melaoprkan yang terjadi dan bahkan dialami sendiri kepada aparat penegak hokum seperti polisi.
3. Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang trafficking.
4. Penganggran dan kemiskinan yang menyebabkan perempuan usia muda mudah dibujuk oleh pelaku perdagangan manusia.

Berdasarkan hasil temuan peneltiian yang dilakukan di Jawa Barat, dapat direkonstruksi temuan tersebut ke dalam pola sebagai berikut:

- a. Akar masalah *human trafficking* adalah kemiskinan dan pendidikan rendah. Pernyataan tersebut dibenarkan oleh hasil penelitian Wismayanti (2012: 118) yang menyebutkan bahwa kondisi kemiskinan di daerah asal, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya informasi dan pengetahuan, dan masih rendahnya upaya perlindungan atas anak-anak, meyebabkan kondsi yang tidak menguntungkan bagi anak sehingga terjebak dalam dunia pelacuran.

Pandangan pendidikan merupakan elevator untuk meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat dikemukakan dalam teori *human capital* yang bertujuan meningkatkan pendidikan dan keterampilan untuk menghasilkan kekayaan. Human

capital membantu untuk menentukan kapasitas penghasilan individu dan kontribusi mereka terhadap kinerja ekonomi negara di mana mereka bekerja. Hal tersebut biasanya diukur dengan memeriksa tingkat keterampilan dan pengetahuan dari penerima seperti anggota suatu perusahaan atau sekumpulan murid sekolah. Akibat dari rendahnya pendidikan mereka, banyak mempekerjakan perempuan sebagai TKW (Khotimah, 2009).

Kemudian Sagala (2008:103) mengemukakan bahwa apa yang terjadi pada korban perdagangan perempuan bukan hanya permasalahan kemiskinan, tetapi merupakan pemiskinan. Dalam menjelaskan mengenai masalah feminisasi kemiskinan, terdapat dua penjelasan feminis, yaitu pertama adalah permasalahan struktur rumah tangga, serta permasalahan pembagian kerja berdasarkan gender (Pressman, 2003:1-2).

Cameron dan Newmann (2008:3) mengidentifikasi empat faktor struktural di masyarakat yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, faktor ideologi, fan faktor geopolitik, yang kemudian menyebabkan posisi rentan bagi perempuan dan anak perempuan untuk diperdagangkan.

Keterampilan, sikap dan pengetahuan yang kurang sebagai akibat tidak memperoleh pendidikan yang layak dan menyebabkan kemiskinan seseorang, menjadi suatu kombinasi yang berpontensi untuk memperoleh kekayaan dengan cara-cara di luar kewajaran. Namun sebuah harapan untuk adanya perubahan dalam setiap individu sebagai korban merupakan suatu terobosan, hal ini sesuai dengan semangat femisme yaitu pergerakan untuk menolak dimarginalisasikan agar kehidupan lebih baik dan mencapai keseimbangan dan interelasi gender.

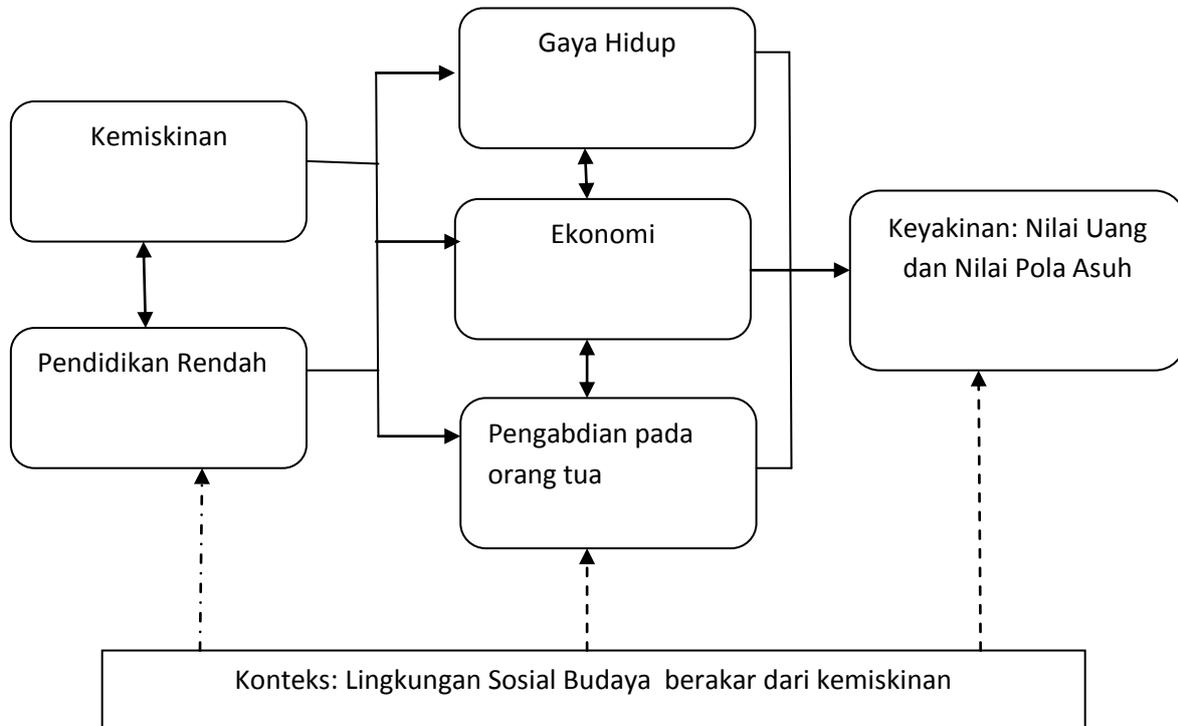
- b. Motivasi dasar gaya hidup, ekonomi dan juga dari sisi kultural untuk mengabdikan pada orang tua merupakan faktor penyebab sekunder dan penyebab primer (kemiskinan dan rendahnya pendidikan). Bauran interaksi budaya lokal, nasional dan global mempengaruhi gaya hidup korban sehingga melakukan cara mudah (instan) dalam memperoleh kekayaan (ekonomi)

yang kadang juga dipengaruhi oleh motivasi pengabdian kepada orang tua.

- c. Keyakinan merupakan sikap hidup sebagai preferensi orang yang paling fundamental untuk melakukan tindakan. Akar masalah kemiskinan dan rendahnya pendidikan telah melakukan transformasi menjadi motivasi untuk melakukan

tindakan dan menjadi kebiasaan karena telah menjadi sebuah keyakinan bahwa kekayaan dapat dihasilkan dengan berbagai cara.

Proposisi tersebut di atas (a, b dan c) dapat dikonstruksi pada gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Faktor Latar Belakang *Human Trafficking*

Faktor penyebab terjadinya *human trafficking* pada diri para korban mayoritas kondisi perekonomian keluarganya miskin, dari 5 informan 4 orang menyatakan keinginan bekerja untuk penghidupan yang lebih baik bagi keluarganya menjadi faktor utama hingga terjadinya tindak pidana ini. Hal tersebut tercermin dari wawancara yang dilakukan kepada S, bahwa “kondisi miskin dengan tiada apapun yang bisa dimakan dapat membuat orang bisa melakukan apapun untuk mengatasinya, sehingga walaupun saya harus dijual untuk bisa bekerja saya rela, yang penting ada uang”.

Selain itu, rentannya keluarga yang menjadi korban dikarenakan faktor pendidikan yang rendah, rata-rata hanya mengenyam pendidikan SD. Dengan demikian, orang tua harus menjaga keharmonisan keluarga agar tidak terjadi hal yang bersifat negatif (Saleh, Maiwan dan Raharjo, 2013: 5)

Apabila ditelaah kembali, proses keluar dari kemiskinan ini prosesnya tentu melalui usaha mencari pekerjaan, sehingga kadang pada kondisi miskin masyarakat tidak bisa memilih, pekerjaan apa yang ada dan ditawarkan, mereka akan segera merespon tanpa pikir panjang. Adapun tabel dibawah ini memperlihatkan faktor penyebab dari kasus yang diteliti :

Tabel 1.
Faktor Penyebab *Human Trafficking*

No	Asal daerah	Usia	Pendidikan Terakhir	Faktor Penyebab	Pekerjaan yang Ditawarkan
1	Kec. Majalaya, Kab. Bandung	23 tahun	SMP	Mencari pekerjaan	Bekerja di supermarket dan menjadi tukang pijat di spa
2	Kec. Ciparay, Kab Bandung	20 tahun	MA	Mencari pekerjaan	Bekerja di Jakarta
3.	Kec. Majalaya, Kab Bandung	16 tahun	SMP	Mencari pekerjaan	Bekerja di salon
4.	Kec. Cimalaka, Kab Sumedang	13 tahun	SMP	Pergaulan	-
5.	Kec. Pacet, Kab. Bandung	52 Tahun	SD	Mencari pekerjaan	Bekerja di perkebunan sawit

Dalam hasil penelitian lain, menyebutkan, adanya pola perekrutan olah para calo/PL dan PPTKIS yang ingin mencari keuntungan sendiri, serta banyaknya pihak yang terlibat dalam penempatan TKW, sehingga menimbulkan pengiriman TKW yang ilegal (Nugroho, 2012: 99). Hal tersebut membuktikan bahwa lemahnya pendidikan yang ada di suatu daerah dapat menjadi penyebab yang luar biasa dalam terjadinya human trafficking.

SIMPULAN

Perdagangan manusia merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia. Hal tersebut dikarenakan dapat membuat diri seseorang baik secara psikologis maupun fisik tertahan dalam sekap yang membuat ruang gerak manusia menjadi terbatas. Melandanya perdagangan manusia pada diri seseorang dapat dilihat dari faktor penguasaan materi (kekayaan), pengetahuan (pendidikan), gaya hidup (ekonomi) dan pendidikan dari orang tua (pola asuh). Apabila keempat faktor tersebut dapat dijalankan secara harmonis oleh orang

tua dengan perlindungan negara, maka korban perdagangan manusia dapat diminimalisir.

DAFTAR RUJUKAN

- Miles, M & Huberman, AM. 2007. *Analisis data Kualitatif : Buku Sumber tentang Metode-metode baru*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Cameron, S., & Newman, E. (2008). *Trafficking in Humans : Social, Cultural, and Political Dimensions*. New York: United Nations University.
- Sagala, V. 2008. Jalan Panjang Bagi Penghapusan Tindak Trafiking. *Jurnal Perempuan* No.59 , 102-109.
- Pressman, S. (2003). *Feminist Explanation for Feminization of Poverty*. Luxemburg: Luxemburg Income Study (LIS).
- Meutia, IF. 2010. Kebijakan Pencegahan Trafficking di Provinsi Lampung (Studi Mengenai Impelemntasi Peraturan Daerah provinsi Lampung Nomor 4 tahun 2006 tentang Pencegahan Trafficking oleh Bidang

- Pemberdayaan Perempuan). *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*. 1 (2). 144-153
- Wiriadmadja, R. 2012. *Metode Penelitian Tindakan Kelas*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Khotimah, K. 2009. Diskriminasi Gender terhadap Perempuan dalam Sektor Pekerjaan. *YINYANG: Jurnal Studi Gender dan Anak*. 4 (1), 158-180.
- Ramdlany, AA dan Munir, M. 2011. Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Seksual Komersial Anak. *Jurnal Pamator*, 4 (2). 187-195.
- Rahayu, D. 2011. Perlindungan Hukum bagi Buruh Migran terhadap Tindakan Perdagangan Perempuan. *Jurnal Hukum*, 18 (1). 115-135.
- Muftichah, S dan Bintoro RW. 2009. Trafficking: Suatu Studi tentang Perdagangan Perempuan Dari Aspek Sosial, Budaya dan Ekonomi Di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Dinamika Hukum*. 9 (1). 125-134.
- Wismayanti, YF. 2012. Perempuan dalam jaring Perdagangan Anak yang Dilakukan Di Kota Surabaya. *Jurnal Sosiokonsepsia*. 17 (2), 117-133.
- Nugroho, OC. 2012. Kajian Atas Kasus-Kasus Pelanggaran HAM TKW di Luar Negeri (Studi Kasus di Provinsi Sumatera Utara dan Disadur dari Hasil Penelitian Pusat Penelitian Hak-Hak Kelompok Khusus Tahun 2010). *Jurnal HAM*. 3 (2). 76-102).
- Saleh, I, Maiwan, M, dan Raharjo. 2013. Kehidupan Prostitusi Remaja dan Solusi Pengulangannya. *Jurnal PPKN UNJ ONLINE*. 1 (2). 1-7. Dapat diakses di <http://skripsippknunj.org>.
- Suhardin, Y. 2008. Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Mimbar Hukum*. 20 (3). 473-486.
- Yin, K.R. (2002). *Studi Kasus Desain dan Metode*, Jakarta: Rajawali Press.
- UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Perda No 3 Tahun 2008 tentang Human Trafficking.